

SKRIPSI

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN
TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

ASRUDDIN

10573 04415 13



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

MAKASSAR

2017

**PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH DAN
TEMUAN AUDIT BPK TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN TAKALAR**

**ASRUDDIN
10573 04415 13**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Muhammadiyah Makassar Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR**

2017



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp.(0411) 866 072 Fax.(0411) 8659988Makassar90221

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : Asruddin

No. Stambuk : 10573 04415 13

Jurusan : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Ahad 08 Oktober 2017 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, Oktober 2017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Hamzah Limpo, MS
NBM : 885533

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA
NBM : 1073428

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

Ismail Rasulong, SE, MM.
NBM : 903078

Ismail Badollahi, SE, M.Si, Ak.CA
NBM : 1073428









UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp.(0411) 866 072 Fax.(0411) 8659988Makassar90221

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Atas Nama Asruddin, Nim 105730441513 ini Telah Diperiksa dan Diterima Oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor Tahun 1439 H/ 2017 M dan Telah Dipertahankan Didepan Penguji Pada Hari Ahad, 08 Oktober 2017 M. Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 18 Muharram 1439 H
08 Oktober 2017 M

Panitia Ujian

1. Pengawas Umum : Dr. H. AbdRahman Rahim, SE.,MM
(Rektor Unismuh Makassar) 
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM
(Dekan Fakultas Ekonomi) 
3. Sekretaris : Drs. H. Sultan Sarda, MM
(Wakil Dek. I Fak. Ekonomi) 
4. Penguji
 - a. Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.CA 
 - b. Drs. H. Sultan Sarda, MM 
 - c. Dr. H. Mahmud Nuhung, MA 
 - d. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,AK.CA 



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI
Jalan Sultan Alauddin No.259 Telp.(0411) 866 072 Fax.(0411) 8659988Makassar90221

PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Asruddin

NIM : 105730441513

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi

Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Dengan Dosen Pembimbing masing-masing :

1. Dr. H. Hamzah Limpo, MS
2. Ismail Badollahi.SE,.M.Si.Ak.CA

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar” adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai tanggung jawab formal untuk di pergunakan sebagai mestinya. Akhir kata saya ucapkan terimah kasih.

Makassar, 08 Oktober 2017

Yang menyatakan,

Asruddin

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*"Kebanggaan kita yang terbesar adalah
bukan tidak Pernah gagal, tetapi
bangkit kembali setiap kali kita jatuh"*

*"Manusia tidak selamanya benar dan tidak selamanya salah,
Kecuali dia yang selalu mengoreksi diri dan membenarkan
Kebenaran orang lain atas kekeliruan diri sendiri"*

*Jangan tunda sampai besok apa yang bisa
Engkau kerjakan pada hari ini*

Kupersembahkan karya ini untuk kedua orang tuaku,
Kakak, dan Keluarga Besarku Tersayang sebagai tanda hormat dan
baktiku atas segala doa dan pengorbanan yang diberikan selama ini

ABSTRAK

Asruddin, (2017). *“Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kantor Bupati Kabupaten Takalar*, Dibimbing oleh H. Hamzah Limpo, dan Ismail Badollahi, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang pengaruh Karakteristik pemerintah daerah (ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat) dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah diukur dengan skor hasil evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD) yang berasal dari laporan penyelenggara pemerintah daerah (LPPD).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kekayaan daerah Berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia, untuk temuan audit BPK berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Sedangkan ukuran daerah, belanja modal dan tingkat ketergantungan dengan pusat tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia.

Kata Kunci: *Karakteristik pemerintah daerah, kinerja pemerintah daerah, laporan kinerja pemerintah daerah, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (EKPPD), laporan penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD), temuan audit.*

ABSTRACT

Asruddin, (2017). *“Influence The Characteristics Of Local Government And Audit Findings Of The Financial Auditing Body On The Performance Of Takalar District Government”*, guided by H. Hamzah Limpo and Ismail Badollahi, Accounting Departement, faculty of economics and business, University Muhammadiyah Makassar.

This study aims to provide information about the influence of local government characteristics of local government (size of area, level of wealth area a level of dependence on the central government) and audit findings of financial auditing bodies on local government performance area measured by the score of performance evaluation results of local governments performance derived from reports of local government officials.

The results of this study indicate that the level of regional wealth have a significant positive effect on government districts/cities in Indonesia.while the size of the region, capital expenditures and the level of dependence on the center have no significant impact on the performance of district/cities in Indonesia

Keywords : *Characteristics Of Local Governments Performance, Performance Evaluation Of Local Government Administration, Report On The Implementation Of The Government*

KATA PENGANTAR



Bismillaahirrahmaanirrahim

Puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya kepada penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan sesuai waktu yang direncanakan. Proposal ini berjudul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.

Dalam penyusunan Skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak terutama dari Dr.H. Hamzah Limpo,MS, selaku Pembimbing I dan Ismail Badollahi, SE.,M.Si.Ak.CA selaku Pembimbing II yang penuh kesabaran telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan proposal ini. Karena itu, Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima Kasih.Terkhusus ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada kedua orang tua atas dorongan dan doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini. Harapan penulis, semoga segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT, Amin.

Seiring berjalannya waktu, hingga akhir skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan serta arahan dari berbagai pihak. Penyusunan skripsi ini disusun guna memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar. Sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM selaku rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA selaku ketua jurusan Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi.
4. Bapak Dr. H. Hamzah Limpo,MS, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Bapak Ismail Badollahi,SE,M.Si,Ak.CA selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu dan memberikan arahan dalam menyelesaikan karya ilmiah ini
6. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu kegiatan penulis dan memberikan ilmunya dari awal perkuliahan sampai pada penyusunan karya ilmiah ini
7. Bapak Drs. H. Saripuddin.M.Si sebagai kepala Badan dan seluruh pegawai Badan Pengelola Keuangan Daerah pada Kantor Bupati Kabupaten Takalar yang telah membantu dalam penelitian ini.
8. Keluarga besar saya yang selalu memberikan saran dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
9. Teman-teman Ak 9.13 yang telah memberikan semangat, dukungan, serta warnadan pengalaman-pengalaman dalam hidup penulis yang tidak bisa terlupakan.

Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, bukan para pemberi bantuan. Oleh karena itu, kritik, saran, dan masukan yang membangun sangat diharapkan dari semua pihak.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan dengan kerendahan hati, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bernilai ibadah dan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca khususnya pihak yang menekuni Bidang Akuntansi, serta menjadi sumbangsih yang berharga bagi pengembangan Ilmu Akuntansi.

Makassar, 03 Juni 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PEGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Karakteristik Pemerintah Daerah	7
B. Temuan Audit BPK.....	12
C. Kinerja Pemerintah Daerah	13
D. Penelitian Terdahulu	14
E. Kerangka Pikir	22
F. Hipotesis Penelitian.....	23

BAB III METODELOGI PENELITIAN	24
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
B. Teknik Pengumpulan Data	24
C. Jenis dan Sumber Data	26
1. Jenis Data	26
2. Sumber Data	26
D. Metode Penganalisaan Data	27
1. Metode Deskriptif.....	27
2. Metode Kuantitatif.....	27
 BAB IV GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN.....	29
A. Sejarah Tempat Penelitian.....	29
B. Visi Misi Dan Tujuan.....	35
C. Struktur Organisasi	37
D. Job Description	38
E. Rencana Strategi.....	40
 BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Hasil Penelitian.....	41
1. Karakteristik Pemerintah Daerah	41
2. Temuan Audit BPK	45
3. Kinerja Pemerintah Daerah	47
B. Pembahasan.....	50
1. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap kinerja Pemerintah daerah	50
2. Pengaruh Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.....	53
 BAB VI PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN	61

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 5.3	Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran	53

DAFTAR LAMPIRAN

1. Laporan Neraca pada Kantor Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2016
2. Laporan Arus Kas Pada Kantor Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2016
3. Surat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar
4. Surat Dari LP3M (Lembaga Penelitian Pengembangan dan Pengabdian Kepada Masyarakat)
5. Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbang)
6. Surat dari Kantor Bupati Bagian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	23
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	35

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desentralisasi di Indonesia yang dimulai pada tahun 2001 mengalihkan berbagai macam kewenangan dan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Pemda). Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (UU No. 32/2004) tentang pemerintah Daerah menegaskan kewenangan Pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Sebagai implikasinya, peran pemerintah daerah dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya sistem pemantauan, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai pemerintah daerah.

Undang-Undang No. 32/2004 selain memberikan kewenangan otonomi kepada pemerintah daerah juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk memberikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) kepada pemerintah pusat. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 (PP No. 3/2007) tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat menyebutkan bahwa ruang lingkup Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) mencakup penyelenggaraan urusan desentralisasi, tugas pembantuan dan tugas umum

pemerintahan. Penyelenggaraan urusan desentralisasi meliputi urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Sedangkan urusan pilihan merupakan urusan yang secara nyata ada di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah. Dengan demikian, isi dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) pemerintah daerah sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing pemerintah daerah tersebut.

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 (PP No. 6/2008) tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa salah satu evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Untuk melengkapi PP No. 6/2008, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No. 73/2009) tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Dalam Pasal 5 Permendagri No. 73/2009 ini disebutkan bahwa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai sumber informasi utama yang difokuskan pada informasi capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan menggunakan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Hasil dari Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) tersebut berupa Laporan Hasil pemeringkatan

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang pertama kalinya diselenggarakan untuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) tahun anggaran 2007.

Dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat, masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) suatu pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (fraud). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi.

Penelitian terkait dengan karakteristik pemerintah daerah, temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan dan kinerja pemerintah daerah belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah dilakukan oleh Zelda (2008) yang mengaitkannya dengan kepatuhan

menyusun laporan keuangan sesuai standar, Liestiani (2008) mengaitkan dengan tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), Rora (2010) mengaitkan dengan tingkat pengungkapan sukarela pada situs Pemerintah daerah, Sumarjo (2010) mengaitkan dengan kinerja keuangan, sedangkan Purba (2006), Rustiono (2008) dan Ahmad (2011) mengaitkan karakteristik pemerintah daerah dengan kinerja ekonomi makro. Untuk variabel temuan audit, Liestiani (2008) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel independen terhadap tingkat pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sedangkan Fazri (2010) menggunakan variabel tersebut sebagai variabel dependen yang menjadi proksi dari Dengan mempertimbangkan penelitian-penelitian sebelumnya, peneliti ingin menguji apakah karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) yang sumber utama informasinya dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD). Penelitian terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD) juga belum banyak dilakukan di Indonesia dan lebih banyak bersifat analisis deskriptif Febriana (2010). Dengan demikian, penelitian ini juga bermaksud melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPPD) dengan melakukan penelitian dalam bentuk penelitian kuantitatif yang mengaitkan karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK dengan kinerja pemerintah daerah tahun anggaran 2007.kelemahan pengendalian internal suatu Pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk membahas masalah karakteristik dan kinerja pemerintah daerah dengan judul “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar”.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yaitu; “Apakah karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK mempengaruhi kinerja pemerintah daerah Kabupaten Takalar?”.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan, antara lain :

1. Untuk memberikan informasi tentang pengaruh karakteristik pemerintah daerah kabupaten takalar dalam mengelola dan mengalokasikan keuangan daerah kabupaten Takalar.
2. Untuk memberikan informasi tentang pengaruh dan hasil temuan audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten Takalar.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membarikan manfaat bagi :

- a. Peneliti, dengan melakukan penelitian ini, maka peneliti akan mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam khusus mengenai

pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah.

- b. Peneliti lainnya, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan data tambahan yang tertarik pada bidang kajian ini.
- c. Akademisi, diharapkan dengan penelitian ini, dapat memberikan pandangan dan wawasan mengenai penetapan peringkat dan status kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- d. Pihak Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2006), Karakteristik adalah cirri-ciri khusus, mempunyai sifat khas (kekhususan) sesuai dengan perwatakan tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) mendefinisikan Karakteristik pemerintah daerah merupakan ciri-ciri khusus yang melekat pada pemerintah daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lain. Suhardjanto dan Yulianingtyas (2010) menggunakan ukuran (*size*), jumlah SKPD, dan status daerah sebagai proksi dari karakteristik pemerintah daerah.

Sumarjo (2010) menemukan bahwa terdapat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal tersebut dapat diterapkan pada sektor publik, dimana karakteristik daerah dapat menjadi prediktor yang baik dalam mengukur kinerja pemerintah. Karakteristik pemerintah daerah merupakan cirri-ciri khusus yang melekat pada daerah, menandai sebuah daerah, dan membedakannya dengan daerah lainnya. Dengan demikian, perbedaan karakteristik pemerintah daerah dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Sumarjo (2010) meneliti tentang karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) Pemada yang diproksikan dengan tota asset, Kemakmuran (*wealth*) yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), ukuran legislatif yang diproksikan dengan jumlah total anggota DPRD, *leverage* yang diproksikan dengan *debt*

to equity dan *intergovernmental revenue* diproksikan dengan perbandingan antara jumlah total dana perimbangan dengan jumlah total pendapatan sebagai variabel independen.

Penelitian yang dilakukan Patrick (2007), menggunakan model Roger dalam mengemukakan karakteristik. Patrick (2007) dalam penelitiannya menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan dua komponen, yaitu struktur organisasi dan lingkungan eksternal.

Menurut Mustikarini dan Fitriyani (2012), Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan proksi total aset, porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, porsi dana alokasi umum terhadap total pendapatan, total belanja daerah, jumlah anggota legislatif. Semakin besar aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan banyaknya jumlah anggota legislatif seharusnya diharapkan akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kinerja yang baik dari pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penelitian ini menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada pemerintah Pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

1. Ukuran Daerah

Dalam Penelitian Sumarjo (2010), dia menjelaskan karakteristik pemerintah daerah dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang di proksikan dengan total aset.

Ukuran yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan kegiatan operasional yang kemudian akan mempermudah dalam member pelayanan masyarakat yang memadai. Selain itu kemudahan di bidang operasional juga akan memberi kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna kemajuan daerah sebagai bukti peningkatan kinerja (Kusumawardani, 2012). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa semakin besar ukuran (*size*) pemerintah daerah maka semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah yang memiliki ukuran yang besar memiliki tekanan yang besar untuk melakukan pengungkapan kinerja keuangan. Pemerintah daerah dalam melakukan pengungkapan atas laporan kinerjanya akan lebih terdorong untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat *good news*. Good news tersebut dapat berupa laporan mengenai baiknya kinerja pemerintah daerah tersebut sehingga meningkatkan skor kinerjanya. Berdasarkan pembahasan mengenai ukuran daerah maka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Aset} = \text{Kewajiban} + \text{Ekuitas}$$

2. Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo 2010).

Hal tersebut senada dengan penelitian Asha florida (2007) yang mengindikasikan bahwa Pendapatan Asli daerah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara, yaitu sebesar 68%. Namun, secara parsial hanya pajak daerah dan retribusi daerah yang secara signifikan berpengaruh, sedangkan dua variable lainnya tidak dominan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Utara.

Dengan menggunakan rasio upaya fiskal dalam menghitung kinerja keuangan daerah, penulis mencoba meneliti seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan, serta komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah apa saja yang secara dominan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di provinsi Sumatera Selatan periode 2005 – 2009. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan dan parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun batasan dari objek penelitian ini adalah: (1) Rasio yang

digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan adalah rasio upaya fiskal; (2) Objek penelitian adalah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2005-2009. Berdasarkan pembahasan diatas dapat dihitung dengan rumus sebai berikut:

$$\text{Rasio cakupan Pendapatan} = \frac{\text{Subjek/objek pendapatan yang terdaftar}}{\text{Potensi subjek / objek pendapatan}} \times 100\%$$

Atau

$$\text{Kekayaan Bersih} = \text{Aset} - \text{Utang}$$

3. Tingkat Ketergantungan Pada Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriasari (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut peraturan perundang-undangan No. 5 tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) di tetapkan oleh daerah. Penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan umum lainnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi

kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.

Dana Alokasi Umum (DAU) di alokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran Dana Alokasi Umum (DAU) di tetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *netto* yang di tetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Proporsi Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota di tetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota.berdasarkan pembahasan diatas dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan daerah} = \frac{\text{Pendapatan transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}}$$

B. Temuan Audit BPK

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah telah selesai disusun dan siap untuk diterbitkan kepada publik, maka diperlukan pelaksanaan sebuah audit guna menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut yang dikerjakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Menurut Bastian (2006), audit pada entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas publik, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara. Jenis pemeriksaan audit

BPK terdiri dari: audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif (Bastian, 2006).

Penelitian mengenai hasil pemeriksaan audit BPK telah dilakukan oleh Mustikarini dan Fitriasaki (2012) yang menggunakan temuan audit BPK dalam menjelaskan hasil audit. Semakin banyak temuan audit menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan dari pemerintah daerah tersebut kurang baik, sehingga berpengaruh terhadap kinerja (Mustikarini dan Fitriasaki, 2012).

C. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

Dalam konteks pembangunan daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai salah satu ukuran utama yang dicantumkan dalam Pola Dasar Pembangunan Daerah. Hal ini menandakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menduduki satu posisi penting dalam manajemen pembangunan daerah. Fungsi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan indikator pembangunan manusia lainnya akan menjadi kunci bagi terlaksananya kinerja dan pembangunan yang terarah.

Peran Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai alat ukur pembangunan akan lebih terlihat bila dilengkapi dengan data basis dan

hitungan yang benar sampai ke wilayah terkecil tanpa membedakan daerah miskin atau tidak sehingga diharapkan perencanaan pembangunan akan benar-benar memihak masyarakat tanpa terkecuali. Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan pengukuran kinerja perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pemerintah daerah adalah Karakteristik Pemerintah daerah dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait dengan pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK sudah banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa ahli.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hafidh Susila Sudarsana, Shiddiq Nur Rahardjo (2013), yaitu tentang Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Variabel ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan variabel belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016), yaitu tentang pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, *intergovernmental revenue*, temuan dan opini audit bpk pada kinerja keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran pemerintah daerah yang diprosikan dengan total pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh menggambarkan bahwa semakin produktif kinerja pemerintah daerah. *Size* yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan pelaksanaan kegiatan maupun program-program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan audit BPK atas kasus kelemahan SPI tidak serta merta menjerus kepada kerugian negara. Adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh pemerintah daerah, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Sella Rachmawi, Rini, Yessi Fitri (2016), yaitu tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor kemandirian daerah, lokasi daerah, opini audit dan temuan audit pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (*logistic regression*) menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kembali kepala

daerah, posisi dan performa keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Ebit Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012), yaitu tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Penelitian yang dilakukan oleh Cherrya Dhia Wenny (2012), yaitu tentang Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Amy Fontanella, (2010), yaitu tentang Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi secara statistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan latar belakang pendidikan tidak signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Anda Dwi Haryadi (2010), yaitu tentang Pengaruh Reviu Inspektorat Dan Nilai Temuan Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Reviu inspektorat berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK tidak terdukung secara statistis.

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Tri Anggraeni (2014), yaitu tentang Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin baik kualitas sumberdaya manusia, semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Andriani, SE., M. Si. Ak, (2010), yaitu tentang Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti

bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung.

Dan penelitian yang dilakukan oleh Achmad Badjuri(2012), yaitu tentang Integritas dan kompetensi auditor sektor public berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor sector publik pada saat melaksanakan penugasan profesional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Auditor sektor publik diharapkan selalu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensinya dalam bertugas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menjadi salah satu pihak pengguna hasil audit sektor public.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Hafidh Susila Sudarsana, Shiddiq Nur Rahardjo (2013)	Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit bpk terhadap kinerja pemerintah daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>deskriptif</i>	Variabel ukuran pemerintah daerah dengan proksi total aset, variabel tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat dengan proksi DAU dibanding total pendapatan dan variabel belanja modal dengan proksi belanja modal dibanding total realisasi belanja terbukti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota. Sedangkan, variabel temuan audit BPK dengan proksi temuan audit dibanding total anggaran belanja, variabel tingkat kekayaan daerah dengan

				proksi PAD dibanding total pendapatan berpengaruh secara signifikan terhadap skor kinerja Pemda kabupaten/kota di Indonesia.
2.	Putu Riesty Masdiantini dan Ni Made Adi Erawati (2016)	pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran, <i>intergovernmental revenue</i> , temuan dan opini audit bpk pada kinerja keuangan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>deskriptif</i>	ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dengan total pendapatan daerah berpengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Semakin banyak pendapatan yang diperoleh menggambarkan bahwa semakin produktif kinerja pemerintah daerah. <i>Size</i> yang besar dalam pemerintah akan memberikan kemudahan pelaksanaan kegiatan maupun program-program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Temuan audit BPK atas kasus kelemahan SPI tidak serta merta menjurus kepada kerugian negara. Adanya pengaruh positif signifikan opini audit BPK pada kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota se-Bali. Semakin baik opini audit BPK yang diperoleh pemerintah daerah, maka dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut.
3.	Sella Rachmawi, Rini, Yessi Fitri (2016)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode model regresi logistic.	Faktor kemandirian daerah, lokasi daerah, opini audit dan temuan audit pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia. Berdasarkan hasil uji regresi logistik (<i>logistic regression</i>) menunjukkan bahwa faktor keterpilihan kembali kepala daerah, posisi dan performa keuangan

				daerah tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia.
4.	Ebit Julitawati, Darwanis, dan Jalaluddin (2012)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>deskriptif</i> .	Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh. Dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
5.	Cherrya Dhia Wenny, (2012)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>deskriptif</i>	Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari komponen PAD sangat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip otonomi daerah.
6.	Amy Fontanella, (2010)	Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bebas dan metode terikat.	Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengetahuan akuntansi secara statistik mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pemanfaatan laporan laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan latar belakang pendidikan tidak signifikan secara statistik terhadap pemanfaatan laporan keuangan pemerintah daerah.

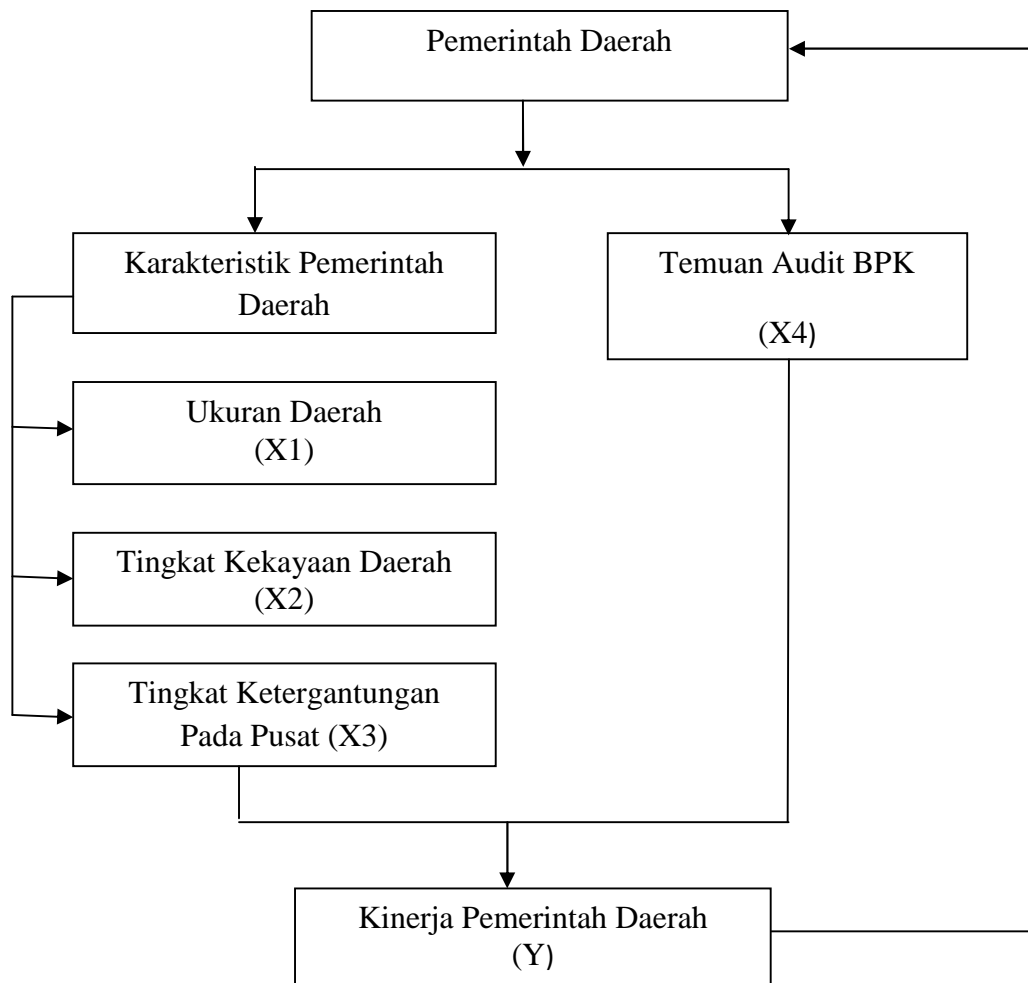
7.	Anda Dwi Haryadi, (2010)	Pengaruh Reviu Inspektorat Dan Nilai Temuan Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK.	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>kuantitatif</i> dan metode <i>deskriptif</i>	Reviu inspektorat berpengaruh signifikan terhadap opini audit BPK tidak terdukung secara statistik.
8.	Dian Tri Anggraeni, (2014)	Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode bebas dan metode terikat	Kualitas SDM berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, karena semakin baik kualitas sumberdaya manusia, semakin baik pula keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah.
9.	Wiwik Andriani, SE., M. Si. Ak, (2010)	Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode <i>survey Kuesioner</i> .	Kapasitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa nilai informasi akan andal jika memiliki sumber daya manusia yang mendukung.
10.	Achmad Badjuri, (2012)	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hasil pemeriksaan audit sektor public	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis regresi berganda.	Integritas dan kompetensi auditor sektor publik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas hasil pemeriksaan yang dihasilkan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi integritas dan kompetensi yang dimiliki oleh auditor sektor publik pada saat melaksanakan penugasan profesional auditnya akan mendorong meningkatnya kualitas hasil pemeriksaan yang

				dihasilkan. Auditor sektor publik diharapkan selalu menjaga integritas dan meningkatkan kompetensinya dalam bertugas sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang menjadi salah satu pihak pengguna hasil audit sektor publik.
--	--	--	--	---

E. Kerangka Pikir

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan Mustikarini dan Fitriyasi (2012). Karakteristik pemerintah daerah terdiri dari ukuran, tingkat kekayaan, tingkat ketrgantugan, dan temuan audit BPK. Berikut ini adalah kerangka pemikiran yang menggambarkan model penelitian dan hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian.

Gambar Kerangka Pikir



F. Hipotesis Penelitian

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Berdasarkan uraian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah; “Karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah”.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kantor Bupati Kabupaten Takalar dan Waktu penelitian direncanakan selama 2 bulan, yaitu pada bulan April-Mei tahun 2017.

B. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan (*Libraty Study*)

Penulis juga menggunakan pengambilan data dengan metode studi pustaka melalui buku-buku , peraturan undang-undang , *website* yang berhubungan dengan penelitian sebagai landasan teori yang digunakan dalam menganalisis kasus atau masalah serta dasar literatur-literatur maupun tulisan-tulisan yang berhubungan dengan penelitian untuk mendapatkan landasan teori.

2. Studi Lapangan (*field Study*)

Metode ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan beberapa teknik dalam mengumpulkan data. Berikut ini ada beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tahap muka dengan mengadakan tanya jawab antara peneliti dengan pihak yang berwenang untuk gambaran umum dan masalah yang

berhubungan dengan karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah Daerah. Teknik wawancara cocok digunakan dalam pendekatan survei, pertanyaan yang efektif akan membantu pengumpulan data yang akurat, karena memberikan kriteria karakteristik pertanyaan yang efektif sebagai berikut :

- 1) Bahasanya jelas.
- 2) Ada ketegasan isi dan periode waktu.
- 3) Bertujuan tunggal (bebas dari asuransidan saran)
- 4) Kesempurnaan dan konsistensi tata bahasa.

b. Hasil Observasi

Obsrvasi adalah metode pengumpulan data yang konfleks karena melibatkan berbagai faktor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namum juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Metode ini juga tepat dilakukan pada responden yang kuantitasnya tidak terlalu besar.

Dari hasil observasi yang saya lakukan ada beberapa permasalahan yang harus diteliti dalam tema yang saya angkat yakni mengenai Pengaruh karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah .

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Studi dokumen adalah

jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

penelitian yang digunakan adalah metode observasional, yaitu dengan mengadakan pengamatan langsung pada objek atau masalah yang diteliti. Sedangkan Desain penelitian menggunakan desain *Cross sectional* yaitu pengambilan data variabel bebas dan variabel terikat dilakukan pada satu waktu / bersamaan waktunya.

Berikut ini ada 2 jenis data yang dalam penelitian, yaitu :

a. Data Kualitatif

Data kualitatif yaitu data yang diperoleh baik secara lisan maupun secara tertulis khususnya mengenai sejarah berdirinya kantor dan data lainnya yang dapat menunjang pembahasan.

b. Data Kuantitatif

Data kuantitatif yaitu data informasi yang berupa symbol angka atau bilangan yang dapat dihitung, misalnya temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh.

Berikut ini beberapa jenis sumber data di dalam suatu penelitian, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung kepada permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen serta arsip-arsip. Data yang bersumber dari dalam instansi berupa hasil pengamatan wawancara terhadap kepala kantor dan beberapa pegawai, literatur buku, literatur internet serta data relevan lainnya sehubungan dengan penelitian.

D. Metode Penganalisaan Data

Dalam Penelitian ini, metode analisis data yang digunakan, yaitu :

1. Metode Deskriptif

Metode *deskriptif* adalah metode yang digunakan untuk menguraikan tentang prosedur audit dan dokumen-dokumen yang dicocokkan dengan asset daerah dalam bentuk fisik. Penyajian metode *deskriptif* bertujuan untuk melihat profil dari data penelitian tersebut dengan hubungan yang ada antar variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut.

2. Metode Kuantitatif

Dari hasil temuan pihak auditor, maka selanjutnya asset sebagai kekayaan daerah dan komponen-komponen yang ada didalamnya, maka

digunakan analisa rasio keuangan pemerintah daerah sebagaimana yang dikemukakan oleh Mahmudin dalam buku Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk klegislatif, pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

BAB IV

GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Pemerintahan Kabupaten Takalar

Kabupaten Takalar mulai berdiri pada tanggal 10 februari 1960, dan proses pembentukannya melalui tahapan perjuangan yang panjang. Sebelumnya, Takalar sebagai Onder Afdeling yang tergabung dalam daerah Swatantra MAKASSAR bersama-sama dengan Onder Afdeling Makassar, Gowa, Maros, Kepulauan Pangkajene, dan Jeneponto.

Onder Afdeling Takalar, membawahi beberapa district (adat gemen chap) yaitu: District Polongbangkeng, District Galesong, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap District diperintah oleh seorang Kepala Pemerintahan yang bergelar Karaeng, kecuali District Topejawa diperintah oleh Kepala Pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Upaya memperjuangkan terbentuknya Kabupaten Takalar dilakukan bersama antara Pemerintah, Politisi, dan Tokoh-tokoh Masyarakat Takalar. Melalui kesepakatan antara ketiga komponen ini, disepakati 2 (dua) pendekatan/cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita perjuangan terbentuknya Kabupaten Takalar, yaitu :

- a. Melalui Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Swatantra Makassar.

Perjuangan melalui lembaga ini Legislatif ini dipercayakan sepenuhnya kepada 4 (empat) orang anggota DPRD utusan Takalar, yaitu:

1. H. Dewakang Dg. Tiro
 2. Daradda Dg. Ngemba
 3. Abu Dg. Mattola,
 4. Abd. Mannan Dg. Liwang.
- b. Melalui pengiriman delegasi dari unsur pemerintah bersama tokoh-tokoh Masyarakat. Mereka menghadap Gubernur Propvinsi Sulawesi Selatan di Makassar Menyampaikan Aspirasi agar harapan terbentuknya Kabupaten Takalar segera terwujud. Mereka yang menghadap ke Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan, adalah :
1. Bapak H. Makkaraeng Dg. Manjarungi
 2. Bostan Dg. Mamajja
 3. H.Mappa Dg. Temba
 4. H.Ahmad Dahlan Dg. Sibali
 5. Nurung Dg. Tombong
 6. Sirajuddin Dg. Bundu dan beberapa tokoh masyarakat lainnya.

Upaya ini dilakukan tidak hanya sekali jalan. Titik terang sebagai tanda-tanda keberhasilan dari perjuangan tersebut sudah mulai nampak, namun belummencapai hasil yang maksimal yaitu keluarnya Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1957 (LN No. 2 Tahun 1957) maka terbentuklah Kabupaten Je'nepono-Takalar dengan Ibukotanya Jeneponto.

Dengan Bupati yang pertama adalah **Bapak H. Mannyingarri Dg. Sarrang** dan **Bapak Abd. Mannan Dg. Liwang** sebagai ketua DPRD. Para politisi dan tokoh masyarakat tetap berjuang, berupaya dengan sekuat tenaga, agar Kabupaten Je'nepono-Takalar segera dijadikan 2 (dua) Kabupaten yang Masing-masing berdiri sendiri yaitu, Kabupaten Jeneponto dan Kabupaten Takalar.

Perjuangan panjang masyarakat Kabupaten Takalar berhasil mencapai puncaknya setelah setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 29 Tahun 1959 (LN Nomor 74 Tahun 1959), tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan, dimana Kabupaten Takalar termasuk didalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tersebut, maka sejak tanggal 10 februari 1960, Terbentuklah Kabupaten Takalar, dengan Bupati/Kepala Daerah yang Pertama adalah **Bapak H. Donggeng Dg. Ngasa** seorang PamongPraja Senior. Selanjutnya, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 13 Tahun 1960 menetapkan Pattallassang sebagai Ibukota Kabupaten Takalar dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 1990 menetapkan Tanggal 10 februari 1960 sebagai Hari Jadi Kabupaten Takalar.

Berdasarkan Struktur Pemerintahan pada waktu itu, Bupati/Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas pemerintahan dibantu oleh 4 (empat) orang Badan Pemerintahan Harian (BPH), dengan personalianya yaitu :

1. BPH Tehnik dan Keamanan : H. Mappa Dg. Temba
2. BPH Keuangan : Bangsawan Dg. Lira
3. BPH Pemerintahan : H. M Dg. Manjarungi
4. BPH Ekonomi : Bostan Dg. Mamajja

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka Districk Polongbangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Polongbangkeng Selatan dan Polongbangkeng Utara, Districk Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara, Districk Topejawa, Districk Takalar, Districk Laikang dan Districk Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (Topejawa, Takalar, Laikang dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu.

Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan, yaitu Kecamatan Pattallassang (Kecamatan Ibukota) dan terakhir dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 April 2017 dan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2007 tanggal 27 April 2007, dua Kecamatan baru terbentuk lagi, yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Utara). Buah kecamatan sebagaimana telah disebutkan terdahulu, kesembilan Kecamatan ini sampai sekarang

Tahun 2016, kabupaten Takalar membawahi sejumlah 76 Desa dan 24 Kelurahan, dengan jumlah penduduk kurang lebih 275.034 jiwa.

Sejak terbentuknya Kabupaten Takalar hingga saat ini, Pejabat Bupati/Kepala Daerah dan Wakilnya silih berganti, demikian pula Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yaitu :

Bupati/Kepala Daerah :

Berikut ini beberapa orang yang telah menjadi Bupati/Kepala Daerah pada kantor Bupati Kabupaten Takalar mulai dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2017 :

1. Donggeng Dg. Ngasa, Masa Jabatan 1960-1964
2. Makkatang Dg. Sibali, Masa Jabatan 1965-1967
3. M. Suaib Pasang, Masa Jabatan 1967-1978
4. Ibrahim Tulle, Masa Jabatan 1978-1983
5. Batong Aminullah, Masa Jabatan 1983- 1987
6. Drs. H. Tadjuddin Nur, Masa Jabatan 1987-1992
7. Drs. H. Syahrul Saharuddin, MS, Masa Jabatan 1992-1997
8. Drs. H. Zaenal Abidin, M.Si, Masa Jabatan 1997- 2002
9. Drs. H. Ibrahim Rewa, MM, Masa Jabatan 2002-2007
10. Drs. H. Ibrahim Rewa, MM, Masa Jabatan 2007-2012
11. DR. H. Burhanuddin Baharuddin, SE,M.Si, Masa Jabatan 2012-2017

Wakil Bupati /Kepala Daerah :

Berikut ini beberapa orang yang telah menjadi Bupati/Kepala Daerah pada kantor Bupati kabupaten Takalar mulai dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2017 :

1. Drs. H. M.Said Pammusu, M.Si, Masa Jabatan 1999-2002
2. Drs. A. Makmur A. Satta, MM, Masa Jabatan 2002-2007
3. Drs. A. Makmur A. Satta, MM, Masa Jabatan 2007-2012
4. H.M. Natsir Ibrahim, MM, Masa Jabatan 2012-2017

Ketua DPRD :

Berikut ini ada beberapa orang yang telah menjadi ketua DPRD kabupaten Takalar, yaitu :

1. H. A. Dahlan Dg. Sibali, Masa Jabatan 1966-1970
2. Ashar Mangung, Masa Jabatan 1970-1971
3. H. Halollang Adam, BA, Masa Jabatan 1971-1977
4. Hasbuddin Muntu, Masa Jabatan 1977-1982
5. H. Abd. Wahab Dg. Ngerang, Masa Jabatan 1982-1987
6. H. Semming Bennu, Masa Jabatan 1987-1992
7. Drs. Sirajuddin Lopo, Masa Jabatan 1992-1997
8. Tjardiman, Masa Jabatan 1997-1999
9. Drs. H. Ibrahim Rewa, MM, Masa Jabatan 1999-2002
10. Drs. H. Nappa Baso, Masa Jabatan 2003-2004 dan 2004-2009
11. Drs. H. Abd, Majid Makkaraeng, MM, Masa Jabatan 2009-2014
12. H. Djabir Bonto, Masa Jabatan 2014-2019

B. Visi, Misi dan Tujuan

1. Visi

“Takalar Terdepan Dalam Pelayanan Menuju Masyarakat Sejahtera, Berkeadilan, Beriman dan Bertakwa”.

a. Terdepan dalam Pelayanan.

Memiliki pengertian sebagai sebuah pemerintahan yang mampu memberi jaminan pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat.

b. Masyarakat Sejahtera.

Kesejahteraan Masyarakat yang dimaksud adalah mereka merasa aman, nyaman, sehat, bebas dari rasa tertekan dan terpenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

c. Berkeadilan.

Mengandung pengertian bahwa pelayanan yang memuaskan dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan.

d. Beriman dan Bertakwa.

Dimaksudkan untuk memberikqan pegangan bahwa landasan pembangunan senantiasa berdasarkan nilai- nilai agama, moral dan etika.

2. Misi

Berikut ini beberapa harapan pemerintah daerah kantor bupati Kabupaten Takalar, yaitu :

a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- b. Mewujudkan Pemerintahan yang bersih
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
- d. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
- e. Meningkatkan Penghayatan Nilai Keagamaan

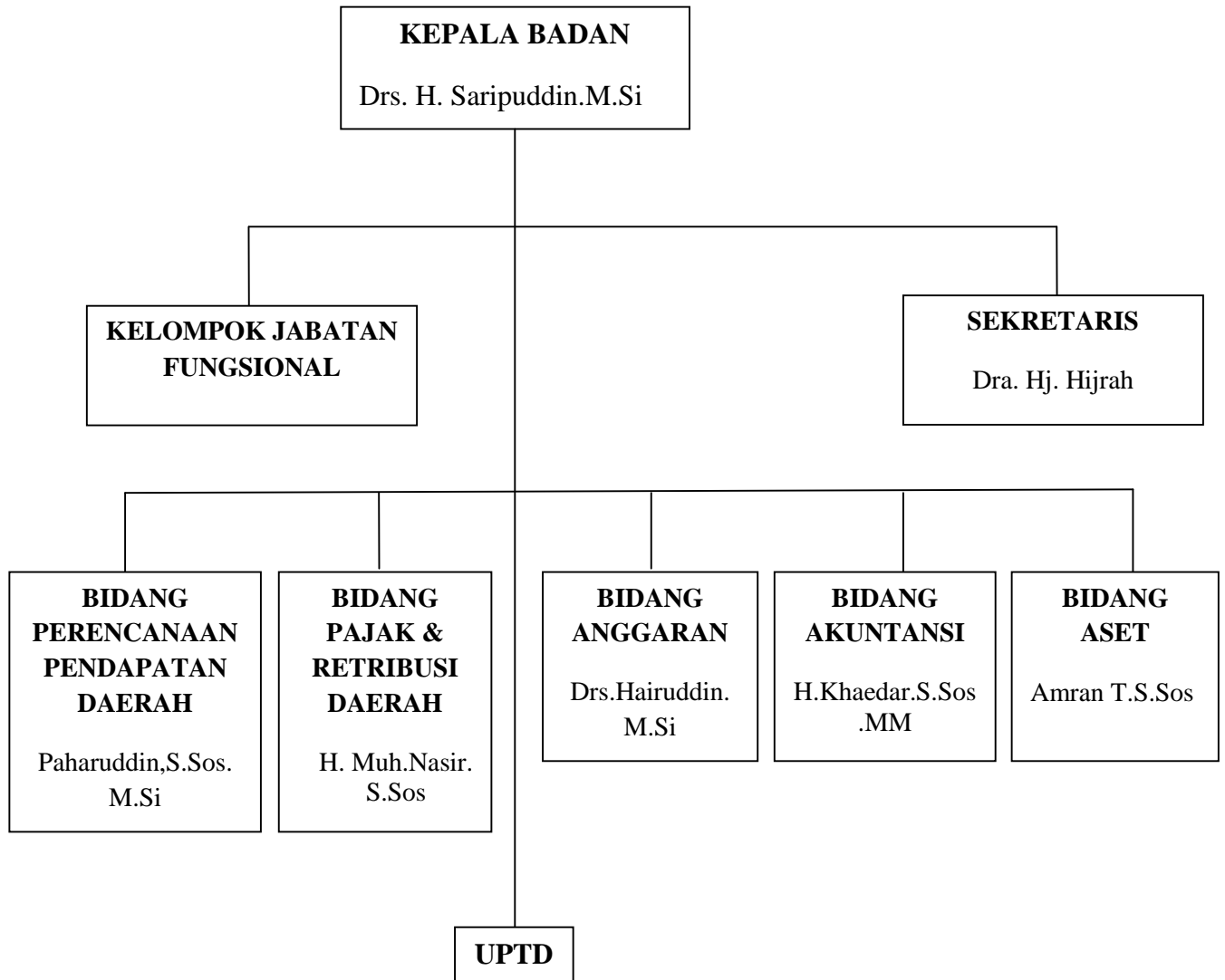
7. Tujuan

Berikut ini beberapa tujuan dari pemerintah daerah kantor bupati kabupaten Takalar, yaitu :

- a. Menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita
- c. Mendorong pertumbuhan nilai investasi
- d. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan opini BPK terhadap laporan keuangan
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
- f. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif.

C. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR



Sumber : Data Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar

D. Job Description

Berikut ini uraian tugas pada kantor Bupati bagian Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Takalar :

1. KEPALA BADAN :

Merumuskan konsep sasaran, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, membina, mengarahkan, mengevaluasi serta melaporkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

2. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL:

Setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

3. SEKRETARIS :

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyalurkan, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum dan kepegawaian, perencanaan dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

4. BIDANG PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH :

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pendapatan Asli Daerah.

5. BIDANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH:

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Pajak dan Retribusi Daerah.

6. BIDANG ANGGARAN :

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Anggaran.

7. BIDANG AKUNTANSI:

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Akuntansi.

8. BIDANG ASET :

Merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Bidang Aset Daerah.

E. Rencana Strategi (Restra)

Berdasarkan Hasil penelitian, adapun beberapa rencana strategi yang diharapkan pada kantor bupati kabupaten Takalar, Yaitu :

1. Menurunkan angka kemiskinan dan angka pengangguran
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis pada hak-hak dasar, kesetaraan gender, nilai budaya dan agama.
3. Meningkatkan pendapatan per kapita
4. Mendorong pertumbuhan nilai investasi
5. Meningkatkan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang inklusif.
6. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
7. Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Karakteristik Pemerintah Daerah

Menurut Mustikarini dan Fitriyasi (2012), Karakteristik pemerintah daerah dalam penelitian ini menggunakan proksi total aset, porsi pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan, porsi dana alokasi umum terhadap total pendapatan, total belanja daerah, jumlah anggota legislatif. Semakin besar aset pemerintah daerah, tingkat kekayaan pemerintah, tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat, belanja daerah, dan banyaknya jumlah anggota legislatif seharusnya diharapkan akan semakin besar sumber daya yang dimiliki untuk memberikan kinerja yang baik dari pemerintah daerah tersebut kepada masyarakat.

Dalam penelitian ini, Karakteristik Pemerintah Daerah dijelaskan dengan menggunakan ukuran (*size*) pemerintah daerah yang diproksikan dengan total aset, tingkat kekayaan daerah yang diproksikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan kepada pemerintah Pusat yang diproksikan dengan Dana Alokasi Umum (DAU).

a. Ukuran Daerah

Adapun rumus untuk menghitung ukuran daerah (Aset daerah) pada kantor Bupati kabupaten Takalar, yaitu :

Aset = Kewajiban + Ekuitas

Aset = Rp.38.988.500.433,87 + Rp.1.230.961.148.616,11

Aset =Rp. 1.269.949.649.049,98

Berdasarkan hasil perhitungan Ukuran Daerah (Aset Daerah) diatas, Ukuran daerah (Aset daerah) pada Kantor Bupati kabupaten Takalar sebesar Rp. 1.269.949.649.049,98 ,sehingga Ukuran Daerah (Aset daerah) ini berpengaruh Positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ukuran daerah (Aset daerah) yang besar/banyak akan memberikan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan dalam bidang operasional juga akan memberikan kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Tingkat Kekayaan Daerah

Tingkat Kekayaan Daerah Yang dinyatakan dengan besarnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

Kekayaan Bersih = Aset - Utang

Kekayaan Bersih= Rp. 1.269.949.649.049,98 – Rp. 38.988.500.433,87

Kekayaan Bersih = Rp. 1.230.961.148.616,11

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat kekayaan daerah diatas, jumlah kekayaan daerah kantor Bupati Takalar sebesar Rp. 1.230.961.148.616,11 ,sehingga tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Tingkat kekayaan daerah yang besar/banyak akan menjadi daya dukung semangat kerja dalam pelaksanaan tugas dan menjadi penunjang kelancaran proses kerja pemerintah daerah disegala bidang.

c. Tingkat Ketergantungan Pada Pemerintah Pusat

Selain ukuran dan tingkat kekayaan Pemda, tingkat ketergantungan Pemerintah daerah kantor Bupati kabupaten Takalar terhadap pemerintah pusat juga berbeda-beda yang diwujudkan dalam bentuk penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU). Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum merupakan sumber pendapatan daerah yang memiliki peran utama dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka mencapai tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah yang ingin meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah. Walaupun penggunaan ditetapkan oleh daerah namun Penggunaan dana alokasi umum dan penerimaan umum lainnya dalam APBD harus tetap pada kerangka pencapaian tujuan pemberian otonomi kepada daerah yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Selain itu dengan semakin besarnya penerimaan DAU oleh satu daerah maka Pemerintah akan lebih memantau pelaksanaan dari alokasi DAU dibanding dengan daerah yang lebih sedikit penerimaannya. Hal ini memotivasi Pemerintah daerah untuk berkinerja lebih baik karena pengawasan dari Pemerintah Pusat lebih besar.

Dengan demikian, semakin tinggi Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pelayanan Pemerintah daerah kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pememerintah daerah juga semakin meningkat. Tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU), dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total pendapatan daerah}}$$

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan Daerah} = \frac{\text{Rp.647.262.885.700,00}}{\text{Rp.41.948.113.000,00}}$$

$$\text{Rasio ketergantungan keuangan Daerah} = \text{Rp. 154.300.835,00}$$

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat yang diprokikan dengan Dana Alokasi Umum pemerintah daerah kabupaten Takalar, yaitu sebesar Rp.154.300.835,00, sehingga tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) berpengaruh positif terhadap kinerja Pemerintah daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dan Dana Alokasi Umum juga menjadi daya dukung semangat kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas dan diberikan untuk pelayanan dan kesejahteraan pegawai dan masyarakat.

2. Temuan Audit BPK

Temuan audit BPK merupakan kasus-kasus yang ditemukan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah daerah atas pelanggaran yang dilakukan suatu daerah terhadap ketentuan pengendalian intern maupun terhadap ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah kantor bupati kabupaten Takalar menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemerintah daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit BPK, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dapat mempengaruhi penilaian atas kinerja pemerintah daerah dan dianggap pencatatan laporan keuangan tidak diakui.

Berdasarkan hasil penelitian, temuan audit BPK mengenai Ukuran daerah (Aset Daerah) pada Kantor Bupati kabupaten Takalar sebesar Rp. 1.269.949.649.049,98 ,tingkat kekayaan daerah sebesar Rp. 1.230.961.148.616,11 Dan tingkat ketergantungan pada pemerintah Pusat sebesar Rp. . 154.300.835,00

Berikut ini hasil ini juga hasil temuan audit BPK mengenai ringkasan Perubahan APBD tahun anggaran 2016, pada kantor Bupati Kabupaten Takalar, yaitu :

Tabel 5.3
Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

No	Uraian	Jumlah	
		Sebelum perubahan	Setelah perubahan
1	Pendapatan Daerah		
1.1	Pendapatan asli daerah	1.028.867.642.000,00	1.028.867.642.000,00
	Hasil pajak daerah	111.680.049.000,00	111.680.049.000,00
	Hasil retribusi daerah	16.760.557.500,00	16.760.557.500,00
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah	4.513.565.700,00	4.513.565.700,00
	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	8.993.318.800,00	8.993.318.800,00
	Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	81.394.607.000,00	81.394.607.000,00
1.2	Dana perimbangan	809.218.170.000,00	809.218.170.000,00
	Bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	20.974.045.000,00	20.974.045.000,00
	Dana alokasi umum	597.985.638.000,00	597.985.638.000,00
	Dana alokasi khusus	190.258.487.000,00	190.258.487.000,00
1.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	107.969.423.000,00	107.969.423.000,00
	Pendapatan hibah	7.199.727.000,00	7.199.727.000,00
	Dana bagi hasil pajak provinsi dan pemerintah daerah lainnya	37.805.432000,00	37.805.432000,00
	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	62.964.264.000,00	62.964.264.000,00
	Jumlah pendapatan	1.028.867.642.000,00	1.028.867.642.000,00
2	Belanja Daerah	1.040.867.642.000,00	1.066.954.829.430,00
2.1	Belanja tidak langsung	623.412.831.100,00	623.412.831.100,00
	Belanja pegawai	507.075.289.205,00	507.075.289.205,00
	Belanja hibah	15.841.200.000,00	15.841.200.000,00
	Belanja bantuan keuangan	98.284.226.000,00	98.284.226.000,00
	Belanja tidak terduga	2.212.115.895.000,00	2.212.115.895.000,00
2.2	Belanja langsung	417.454.810.900,00	443.541.998.330,00
	Belanja pegawai	75.694.391.493,00	75800.191.493,00
	Belanja barang dan jasa	207.142.946.931,00	207.635.938.421,00

	Belanja modal	134.617.472.476,00	160.105.868.416,00
	Jumlah belanja	1.040.867.642.000,00	1.066.954.829.430,00
	Surplus/defisit	(12.000.000.000,00)	(38.087.187.430,00)
3	Pembiayaan Daerah	12.000.000.000,00	41.398.205.730,00
3.1	Penerimaan pembiayaan daerah	15.000.000.000,00	44.398.205.730,00
	Sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya	15.000.000.000,00	44.398.205.730,00
3.2	Pengeluaran pembiayaan daerah	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Penyertaan modal (investasi)	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Pembiayaan netto	12.000.000.000,00	41.398.205.730,00
	Sisa lebih anggaran	0,00	3.311.018.300,00

Berdasarkan Tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa temuan audit BPK terhadap Ringkasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 pada kantor bupati kabupaten Takalar begitu banyak dan terjadi perubahan mengenai pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 1.028.867.642.000,00, belanja daerah sebesar Rp.1.066.954.829.430,00, pembiayaan daerah sebesar Rp. 41.398.205.730,00, dan sisa lebih anggaran sebesar Rp. 3.311.018.300,00. Sehingga temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah.

3. Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Bastian (2006) mendefinisikan kinerja sebagai prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pengukuran kinerja ini dimaksudkan untuk mengetahui capaian kinerja yang telah dilakukan organisasi

dan sebagai alat untuk pengawasan serta evaluasi organisasi. Pengukuran kinerja akan memberikan umpan balik sehingga terjadi upaya perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan di masa mendatang.

Kinerja adalah sesuatu yang dicapai atau prestasi yang diperlihatkan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001). Sedangkan pengukuran kinerja dikemukakan oleh Westin (1998) dalam Sumarjo (2010) prsoses pengawasan secara terus menerus dan pelaporan capaian kegiatan, khususnya kemajuan atas tujuan yang direncanakan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2009 (Permendagri No.73/2009) menyebutkan bahwa salah satu evaluasi kinerja yang dilakukan pemerintah terhadap Pemda berupa Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKKPD) yang menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama. EKPPD adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Sistem pengukuran kinerja adalah sistem yang digunakan untuk mengukur, menilai dan membandingkan secara sistematis dan berkesinambungan atas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada pasal 32 Permendagri No.73/2009 disebutkan bahwa pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota secara nasional, disusun berdasarkan peringkat, skor dan status.

Berdasarkan hal ini maka didapatkan Skor Kinerja untuk Pemerintah daerah kantor Bupati kabupaten Takalar. Berikut ini pengaruh ada beberapa

pengaruh karakteristik pemerintah Daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja pemerintah daerah, yaitu :

- a. Semakin besar ukuran daerah (Aset daerah) kantor bupati kabupaten Takalar, maka diharapkan akan semakin tinggi kinerja Pemerintah daerah.
- b. Pertumbuhan yang positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut akan mendorong adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah yang baik serta investasi yang tinggi disuatu daerah akan meningkatkan PAD Pemda tersebut.
- c. Semakin tinggi Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat maka diharapkan semakin baik pula pelayanan Pemerintah daerah kantor bupati kabupaten takalar kepada masyarakatnya sehingga kinerja Pemerintah daerah juga semakin meningkat.
- d. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga kinerja pemerintah daerah kantor bupati kabupaten Takalar akan lebih baik.
- e. Semakin banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Pemerintah daerah menggambarkan semakin buruknya kinerja Pemerintah daerah kantor bupati kabupaten Takalar. Dengan kata lain, semakin tinggi angka temuan audit, maka menunjukkan semakin rendahnya kinerja suatu Pemerintah daerah kantor bupati kabupaten Takalar.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan Hasil penelitian, Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, karena semakin baik karakteristik pemerintah daerah, maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah.

a. Ukuran Daerah

Ukuran daerah (Aset Daerah) memiliki hubungan langsung terhadap kinerja pemerintah daerah, Hal ini menjelaskan bahwa semakin besar atau banyak ukuran daerah (Aset Daerah), maka kinerja pemerintah daerah yang dilakukan semakin baik dan lancar.

Berdasarkan Hasil Penelitian, Ukuran Daerah (Aset Daerah) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah pada Kantor Bupati Kabupaten Takalar. Hal ini disebabkan karena Ukuran Daerah (Aset Daerah) yang besar atau banyak akan memberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar.

Berikut ini, ada beberapa pengaruh Ukuran Daerah (Aset Daerah) terhadap kinerja pemerintah Daerah kabupater Takalar, yaitu:

1. Memberikan kemudahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat.
2. Memberikan kelancaran dalam memperoleh Pendapatan Asli Daerah (PAD).

b. Tingkat Kekayaan Daerah

Kekayaan (*wealth*) pemerintah daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004 dalam Sumarjo 2010).

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kekayaan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah pada kantor Bupati Kabupaten Takalar. Hal ini disebabkan karena tingkat kekayaan daerah yang besar atau banyak juga mempermudah segala kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar.

Berikut ini ada beberapa pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar, yaitu:

1. Menjadi daya dukung semangat kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan tugas kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar.
2. Mempermudah pemerintah daerah kabupaten takalar dalam memberikan pelayanan atau bantuan kepada masyarakatnya.
3. Menjadi penunjang kelancaran proses kerja pemerintah daerah kabupaten Takalar disegala bidang.

c. Tingkat ketergantungan Pada Pemerintah Pusat

Pada penelitian Mustikarini dan Fitriyani (2012), tingkat ketergantungan dengan pusat dinyatakan dengan besarnya Dana Alokasi Umum (DAU). Menurut peraturan perundang-undangan No. 5 tahun 2005, Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Berdasarkan Hasil penelitian, kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar sangat dipengaruhi oleh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) karena semakin tinggi Dana Alokasi Umum dari pemerintah Pusat maka pelayanan pemerintah daerah kabupaten Takalar akan semakin baik. Sehingga tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar.

Berikut ini ada beberapa pengaruh tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat (Dana Alokasi Umum) terhadap kinerja pemerintah Daerah kabupaten Takalar, yaitu:

1. Dana Alokasi Umum Membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
2. Mempermudah pelayanan kepada para pegawai
3. Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat.

4. Menjadi daya dukung semangat kerja pemerintah daerah kabupaten Takalar.
5. Memotivasi pemerintah daerah kabupaten takalar untuk bekenerja lebih baik.

2. Pengaruh Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Setelah laporan keuangan pemerintah daerah telah selesai disusun dan siap untuk diterbitkan kepada publik, maka diperlukan pelaksanaan sebuah audit guna menilai tingkat kewajaran laporan keuangan pemerintah daerah tersebut yang dikerjakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditunjuk langsung oleh Presiden.

Menurut Bastian (2006), audit pada entitas publik berbeda dengan audit pada entitas swasta karena pada entitas publik, dalam hal ini pemerintah daerah yang bersifat nirlaba, audit yang dilakukan berkaitan dengan pengelolaan kekayaan milik negara. Jenis pemeriksaan audit BPK terdiri dari: audit keuangan, audit kinerja, dan audit investigatif (Bastian, 2006).

Berdasarkan Hasil penelitian, temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja Pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena smakin banyak temuan Audit BPK mengenai keuangan dan kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar, maka kinerja pemerintah daerah kabupaten Takalar akan buruk dan lambat.

Berikut ini beberapa pengaruh temuan Audit BPK terhadap kinerja Pemerintah daerah Kabupaten Takalar, yaitu:

- a. Temuan audit BPK yang banyak menggambarkan Kinerja pemerintah daerah akan semakin rendah.
- b. Temuan audit BPK yang banyak menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah kurang baik.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Karakteristik pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah, artinya semakin baik karakteristik pemerintah daerah, maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah. Dan temuan audit BPK berpengaruh Negatif terhadap kinerja pemerintah daerah, karena Temuan audit BPK yang semakin banyak akan menunjukkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah kurang baik. Hal ini disebabkan karena dapat mempengaruhi penilaian atas kinerja pemerintah daerah dan dianggap pencatatan laporan keuangan tidak diakui.

Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa karakteristik suatu pemerintah daerah (Pemda) dan temuan audit BPK memiliki pengaruh terhadap skor kinerja Pemerintah daerah kabupaten/kota untuk tahun anggaran 2007. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa semua variabel karakteristik Pemerintah daerah dan juga temuan audit BPK berpengaruh signifikan terhadap variabel independen dengan arah yang sesuai dengan hipotesis kecuali untuk variabel belanja daerah. Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah dan tingkat ketergantungan

Daerah terhadap pemerintah pusat berpengaruh positif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah sedangkan variabel belanja daerah dan temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap skor kinerja Pemerintah daerah.

Hasil dari penelitian ini memberikan implikasi kepada Pemerintah daerah kabupaten Takalar bahwa:

1. Pemerintah daerah dengan ukuran dan pendapatan asli daerah (PAD) yang besar seharusnya memiliki nilai skor kinerja yang tinggi. Jika Pemerintah daerah dengan ukuran dan PAD yang besar ternyata memiliki nilai skor yang rendah maka Pemerintah daerah tersebut harus sadar dan mawas diri bahwa kinerjanya berarti lebih tidak baik dibanding Pemerintah daerah dengan ukuran dan pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memang lebih kecil. Pemerintah daerah dengan ukuran dan PAD yang besar dituntut untuk lebih baik dalam mengelola dan memanfaatkan asset serta kekayaan yang dimilikinya demi pelayanan kepada masyarakat.
2. Pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pusat (dana alokasi umum / DAU besar) membuat Pemerintah daerah semakin berhati-hati dalam melaksanakan tugas pelayanannya kepada masyarakat karena merasa diawasi oleh pemerintah pusat. Namun hal ini seharusnya tidak menjadikan Pemerintah daerah dengan DAU yang kecil untuk memberikan pelayanan yang tidak optimal kepada masyarakat karena Pemerintah daerah dengan DAU yang kecil biasanya memiliki kekayaan asli daerah (PAD) yang besar. Sehingga sesuai

dengan implikasi pada poin 1, dengan PAD yang besar maka kinerjanya jugadituntut semakin baik.

3. Hasil dari penelitian ini terkait dengan temuan audit BPK menunjukkan bahwa Pemerintah daerah kabupaten Takalar harus lebih berhati-hati dalam masalah pengelolaan keuangan Negara karena hal ini tidak hanya terkait dengan masalah secara akuntansi saja tapi juga terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
4. Berdasarkan penelitian ini, Pemerintah daerah kabupaten takalar dengan total belanja yang besar ternyata membuat kinerjanya semakin tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa kemungkinan pengeluaran Pemerintah daerah lebih banyak digunakan untuk belanja yang sifatnya rutin, bukan belanja modal dan infrastruktur yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian ini, Pemerintah daerah kantor Bupati Takalar harus bisa mengelola belanjanya dalam bentuk pengeluaran-pengeluaran yang lebih produktif dan bisa meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat, bukan dalam bentuk belanja yang sifatnya rutin dan tidak memberika nnilai tambah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan bahwakarakteristik pemerintahdaerah berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah dan Temuan audit BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah

daerah, Adapun beberapa saran yang dapat dijadikan masukan kepada Kantor Bupati Kabupaten Takalar, yaitu :

1. Pemerintah daerah perlu melibatkan para pegawainya terutama bagian keuangan dalam pengembangan kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
2. Diharapkan adanya partisipasi mereka dan mampu mengeliminasi keluhan-keluhan yang sering terjadi selama ini.
3. Untuk Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data skor kinerja pemerintah daerah untuk beberapa tahun, karena penilaian skor kinerja atas LPPD dilakukan setiap tahun oleh Kementrian Dalam Negeri.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan variabel lain yang menjadi indikator kunci (IKK) dan menjadi komponen dalam penilain skor kinerja seperti misalnya terkait dengan kinerja keuangan Pemda dan kinerja bidang urusan wajib yang menjadi wajib Pemda, seperti misalnya tingkat pertumbuhan ekonomi atau variabel diluar kinerja keuangan seperti jumlah penduduk, jumlah pegawai dan jumlah fasilitas umum dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Irdam. (2011). *Regional Fiscal Independence In East Java Province Post Regional Autonomy. Economic Journal of Emerging Markets*.
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*, SalembaEmpat, Jakarta
- Erlina, 2008. *Metode Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama, USU Press, Medan.
- Florida, Asha. 2006. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Utara*. Tesis, Program Studi Ilmu Akuntansi Universitas Sumatera Utara, Medan
- Kusumawardani, Media. 2012. 'Pengaruh Size, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, Leverage terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia'. *Accounting Analysis Journal I*. Universitas Negeri Semarang.
- Martani D., dan Liestiani, A. 2012. Disclosure in Local Government Financial Statement: the Case of Indonesia. *Global Review of Accounting & Finance, Vol 3. No.1*.
- Mustikarini, W. A., dan Fitriyasi, D. 2012. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia Tahun Anggaran 2007". *Simposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Patrick, P. A. 2007. *The Determinant of Organizational Inovativeness: The Adoption of GASB 34 in Pennsylvania Local Government. Unpublished Ph.D Dissertation*. Pennsylvania: The Pennsylvania State University.
- Suhardjanto, D., dan Yulianingtyas. R. R. 2011. "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". *Jurnal Akuntansi dan Auditing*.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: AFABETA
- Sumarjo, Hendro. (2010). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia*. Skripsi Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Jurnal :

- Sudarsana,Hafidh Susila dan Rahardjo,Shiddiq Nur. (2013). “Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”.*Journal Of Accounting*.
- Masdiantini,Putu Riesty dan Erawati,Ni Made Adi. (2016). “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, *Intergovernmental Revenue*, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan”. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Rachmawi, Sella, Rini dan Fitri,Yessi.(2016). “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia”.Jurnal Ilmu Akuntansi.
- Julitawati,Ebit 1, Darwanis2, Jalaluddin3. (2012).“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh”.Jurnal Akuntansi.
- Wenny,Cherrya Dhia. (2012). “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sumatera Selatan”.Jurnal Ilmiah STIE MDP
- Fontanella,Amy. (2010). “Analisis Pengaruh Latar Belakang Pendidikan dan Pengetahuan Akuntansi Pengguna Terhadap Pemanfaatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Jurnal Akuntansi & Manajemen.
- Haryadi,Anda Dwi. (2010). “Pengaruh Reviu Inspektorat Dan Nilai Temuan Pemeriksaan Terhadap Opini Audit BPK”. Jumal Akuntansi & Manajemen.
- Anggraeni,Dian Tri. (2014). “Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Keterandalan PelaporanKeuanganPemerintah Daerah”.Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi.
- Andriani,Wiwik, SE., M. Si. Ak. (2010). “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatwaktuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”.Jurnal Akuntansi & Manajemen.
- Badjuri, Achmad. (2012). “Analysis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan Audit Sektor Publik”. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*.

LAMPIRAN

Laporan Neraca Kantor Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2016

No.	Uraian	Reff	Jumlah
1	ASET	7.5.3.1	
2	Aset Lancar :	7.5.3.1.1	
3	Kas di kas daerah		163.426.863.373,64
4	Kas di bendahara pengeluaran		1.578.410.101,00
5	Kas dibendahara penerimaan		0,00
6	Kas di bendahara kapitasi JKN		259.436.941,00
7	Kas di BLUD		473.440.039,00
8	Investasi Jangka Pendek		0,00
9	Piutang Pajak		9.248.082.255,59
10	Penyisihan piutang pajak		(490.982606,20)
11	Piutang pajak netto		8.757.099.649,39
12	Piutang retribusi		510.471.773,00
13	Penyisihan piutang retribusi		(23.454.367,73)
14	Piutang retribusi netto		487.017.405,27
15	Piutang lain-lain PAD yang sah		3.762.639.458,00
16	Penyisihan piutang lain-lain PAD yang sah		(37.626.394,58)
17	Piutang lain-lain PAD yang sah netto		3.725.013.063,42
18	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan		0,00
19	Penyisihan piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.		0,00
20	Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan netto		0,00
21	Piutang transfer pemerintah daerah lainnya		2.276.754.702,00
22	Penyisihan piutang transfer pemerintah daerah lainnya		0,00
23	Piutang transfer pemerintah daerah lainnya netto		0,00

24	Piutang pendapatan lainnya		0,00
25	Penyisihan piutang pendapatan lainnya		0,00
26	Piutang pendapatan lainnya netto		0,00
27	Belanja dibayar dimuka		0,00
28	Penyisihan belanja dibayar dimuka		0,00
29	Belanja dibayar dimuka netto		0,00
30	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan negara		0,00
31	Penyisihan bagian lancar pinjaman kepada perusahaan Negara		0,00
32	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan Negara netto		0,00
33	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah		0,00
34	Penyisihan bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah		0,00
35	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah netto		0,00
36	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan pusat		0,00
37	Penyisihan bagian lancar pinjaman kepada perusahaan pusat		0,00
38	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan pusat netto		0,00
39	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya		0,00
40	Penyisihan bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya		0,00
41	Bagian lancar pinjaman kepada perusahaan daerah lainnya netto		0,00
42	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran		72.646.000,00
43	Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran		(72.646.000,00)
44	Bagian lancar tagihan penjualan angsuran netto		0,00
45	Bagian lancar tuntutan ganti rugi		1.300.413.769,59
46	Penyisihan bagian lancar tuntutan ganti rugi		(147.044.357,05)

47	Bagian lancar tuntutan ganti rugi netto		1.153.369.412,54
48	Piutang lainnya		568.431.000,00
49	Penyisihan piutang lainnya		(302.053.250,00)
50	Piutang lainnya netto		266.377.750,00
51	persediaan		4.715.259.103,07
52	Total Aset Lancar		187.119.041.540,33
53	Investasi Jangka Panjang :	7.5.3.1.2	
54	Investasi Nonpermanen :	7.5.3.1.2a	
55	Pinjaman jangka panjang		0,00
56	Investasi dalam obligasi		0,00
57	Investasi dalam proyek pembangunan		0,00
58	Dana bergulir		780.180.152,00
59	Investasi nonpermanen lainnya		0,00
60	Total Investasi Nonpermanen		780.180.152,00
61	Investasi Permanen :	7.5.3.1.2b	
62	Penyertaan modal pemerintah daerah		25.948.889.085,29
63	Investasi permanen lainnya		0,00
64	Total Investasi Permanen		25.948.889.085,29
65	Total Investasi Jangka Panjang		26.729.079.237,29
66	Aset Tetap :	7.5.3.1.3	
67	Tanah		215.620.110.935,00
68	Peralatan dan mesin		200.619.871.468,71
69	Gedung dan bangunan		471.847.567.505,49
70	Jalan, irigas dan jaringan		558.454.341.579,37
71	Aset tetap lainnya		4.430.403.332,75
72	Konstruksi dalam pengerjaan		21.810.199.804,77
73	Akumulasi penyusutan		(549.600.459.168,12)
74	Total Aset Tetap		923.182.035.457,97
75	Dana cadangan :	7.5.3.1.4	
76	Dana cadangan		0,00

77	Total dana cadangan		0,00
78	Aset lainnya :	7.5.3.1.5	
79	Tagihan penjualan angsuran		0,00
80	Penyisipan tagihan penjualan angsuran		0,00
81	Tagihan penjualan angsuran netto		0,00
82	Tuntutan kerugian daerah		0,00
83	Penyisihan tuntutan kerugian daerah		0,00
84	Tuntutan kerugian daerah netto		0,00
85	Kemitraan dengan pihak ketiga		0,00
86	Aset tak berwujud		3.993.434.954,00
87	Amortisasi aset tak berwujud		0,00
88	Aset tak berwujud netto		0,00
89	Aset lain-lain		128.926.057.860,39
90	Total Aset Lainnya		132.919.492.814,39
91	TOTAL SELURUH ASET		1.269.949.649.049,98
92	KEWAJIBAN	7.5.3.2	
93	Kewajiban Jangka Pendek :	7.5.3.2.1	
94	Utang perhitungan pihak ketiga (PFK)		9.442.483,00
95	Utang bunga		0,00
96	Bagian lancar utang jangka panjang		0,00
97	Pendapatan di terima dimuka		587.500,00
98	Utang belanja		38.978.490.450,87
99	Utang jangka pendek lainnya		0,00
100	Jumlah Jangka Pendek Lainnya		38.988.500.433,87
101	Kewajiban Jangka Panjang :	7.5.3.2.2	
102	Utang dalam negeri-sektor perbankan		0,00
103	Utang dalam negeri-Obligasi		0,00
104	Premium (diskonto) obligasi		0,00
105	Utang jangka panjang lainnya		0,00
106	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		0,00

107	JUMLAH SELURUH KEWAJIBAN		38.988.500.433,87
108	Ekuitas Dana		
109	Ekuitas Dana Lancar :		
110	Sisa lebih pembiayaan anggaran		0,00
111	Pendapatan yang ditangguhkan		0,00
112	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang		0,00
113	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		0,00
114	Ekuitas Dana Investasi :		
115	Diinvestasikan dalam investasi jangka Panjang		0,00
116	Diinvestasikan dalam Aset Tetap		0,00
117	Diinvestasikan dalam Aset lainnya		0,00
118	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek		0,00
119	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		0,00
120	Ekuitas Dana Cadangan :		
121	Diinvestasikan dalam dana cadangan		0,00
122	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan		0,00
123	JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA		0,00
124	EKUITAS	7.5.3.3	1.230.961.148.616,11
125	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.269.949.649.049,98

Laporan Arus Kas Pada Kantor Bupati Kabupaten Takalar Tahun 2016

No.	Uraian	Reff	Jumlah
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	7.5.5.1	
2	Arus Kas Masuk :	7.5.5.1.a	
3	Penerimaan Pajak Daerah		9.466.053.249,00
4	Penerimaan Retribusi Daerah		6.134.299.759,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan		7.325.646.739,56
6	Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah		51.901.932.724,76
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak		7.788.205.400,00
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		7.546.004.784,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum		554136.141.000,00
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		175.822.130.000,00
11	Penerimaan Dana Penyusuaian		142.866.885.000,00
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak		36.483.886.212,94
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya		14.571.538.400,00
14	Penerimaan Hibah		
15	Penerimaan Dana Darurat		
16	Penerimaan Lainnya		
17	Penerimaan Dari Pendapatan Luar Biasa		
18	Jumlah Arus Kas Masuk		1.014.889.316.268,00
19	Arus Kas Keluar :	7.5.5.1.b	
20	Pembayaran Pegawai		465.248.874.340,00
21	Pembayaran Barang		252.328.278.686,50
22	Pembayaran Bunga		0,00
23	Pembayaran Subsidi		0,00
24	Pembayaran Hibah		2.750.000.000,00
25	Pembayaran Bantuan Sosial		1.000.000.000,00
26	Pembayaran Tak Terduga		0,00

27	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00
28	Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Ke Desa		31.246.889.000,00
29	Pembayaran Bagi Hasil Pajak		0,00
30	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi		0,00
31	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00
32	Pembayaran Kejadian Luar Biasa		0,00
33	Pembayaran Pungutan Pajak		340.348.459,00
34	Pembayaran Bantuan Kepada Partai Politik		379.383.150,00
35	Jumlah Arus Kas Keluar		753.293.773.605,50
36	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi		261595.542.662,76
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	7.5.5.2	
38	Arus Kas Masuk :	7.5.5.2.a	
39	Pencairan Dana Cadangan		0,00
40	Penjualan Atas Tanah		0,00
41	Penjualan Atas Peralatan Dan Mesin		0,00
42	Penjualan Atas Gedung Dan Bangunan		0,00
43	Penjualan Atas Jalan, Irigasi Dan Bangunan		0,00
44	Penjualan Atas Aset Tetap		0,00
45	Penjualan Atas Aset Lainnya		0,00
46	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00
47	Penerimaan Penjualan Investasi Non-Permanen		0,00
48	Jumlah arus kas masuk		0,00
49	Arus kas keluar :	7.5.5.2.b	
50	Pembentukan Dana Cadangan		0,00
51	Perolehan Tanah		638.436.640,00
52	Perolehan Peralatan Dan Mesin		39.993.774.490,00
53	Perolehan Gedung Dan Bangunan		57.779.379.842,00

54	Perolehan Jalan, Irigasi Dan Bangunan		112.207.521.695,00
55	Perolehan Aset Tetap		687.393.000,00
56	Perolehan Aset Lainnya		39.400.000,00
57	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		2.000.000.000,00
58	Pengeluaran Pembelian Investasi Non-Permanen		0,00
59	Jumlah Arus Kas Keluar		213.345.905.667,00
60	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi		(213.345.905.667,00)
61	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	7.5.5.3	
62	Arus Kas Masuk :	7.5.5.3.a	
63	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		0,00
64	Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		0,00
65	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		0,00
66	Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Non-Bank		0,00
67	Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi		0,00
68	Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		0,00
69	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Pusat		0,00
70	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00
71	Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Lainnya		0,00
72	Jumlah Arus Kas Masuk		0,00
73	Arus Kas Keluar :		0,00
74	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Pusat		0,00
75	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya		0,00
76	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank		0,00
77	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Non- Bank		0,00

78	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi		0,00
79	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya		0,00
80	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		0,00
81	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		0,00
82	Pemberian Pinjaman Kepada Daerah Lainnya		0,00
83	Jumlah Arus Kas Keluar		0,00
84	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan		0,00
85	ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON-ANGGARAN	7.5.5.4	
86	Arus Kas Masuk :	7.5.5.4.a	
87	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		70.825.560.489,86
88	Penerimaan Kembali Kas Bendahara Pengeluaran		2.705.201.409,50
89	Jumlah Arus Kas Masuk		73.530.761.898,86
90	Arus Kas Keluar :	7.5.5.4.b	
91	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		70.825560.489,36
92	Pemberian Kas Kepada Bendahara Pengeluaran		184.569.315.680,00
93	Jumlah Arus Kas Keluar		255.394.876.169,36
94	Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Non-Anggaran		(181.864.114.270,50)
95	Kenaikan/Penurunan Kas	7.5.5.5	113.614.447.274,74
96	Saldo Awal Kas Di BUD	7.5.5.6	116.994.055.065,88
97	Saldo Akhir Kas Di BUD	7.5.5.7	(16.620.422.218,86)
98	Terdiri Dari :		
99	Saldo Akhir Kas Di Kas Daerah		163.426.863.373,64
100	Saldo Akhir Kas Di JKN		259.436.941,00
101	Saldo Di BLUD	7.5.5.8	473.440.039,00

102	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran	7.5.5.9	1.578.410.101,00
103	Saldo Akhir Kas Dibendahara	7.5.5.10	
104	SALDO AKHIR KAS		165.738.150.454,64

RIWAYAT HIDUP



Asruddin, lahir di Laikang Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 06 Juli 1994. Penulis adalah anak ke Tiga dari Empat bersaudara, buah hati dari Salasa dan Taiba. Penulis mulai memasuki jenjang pendidikan Sekolah Dasar di SDN No.113 Laikang Desa Laikang

Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2002 dan tamat pada tahun 2007. Selanjutnya, Penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 4 Mangarabombang Kabupaten Takalar pada tahun 2007 dan tamat pada tahun 2010. Kemudian pada tahun yang sama juga, Penulis melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 1 Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Berhasil lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikannya ke Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi pada tahun 2013.

Berkat pertolongan Allah SWT, perjuangan dan kerja keras yang disertai iringan doa dari kedua orang tua dan saudara, perjuangan panjang Penulis dalam mengikuti pendidikan diperguruan tinggi dapat berhasil dengan terkhususnya skripsi ini.